

**DISERTASI**

**DETERMINAN PENYALURAN KREDIT PERBANKAN PADA  
SEKTOR UTAMA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN  
EKONOMI REGIONAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*DETERMINANTS OF BANKING CREDIT DISTRIBUTION TO MAIN  
SECTORS IN ENCOURAGING REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN  
SOUTH SULAWESI PROVINCE*

**EMILY NUR SAIDY**

**A013191007**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

### DETERMINAN PENYALURAN KREDIT PERBANKAN PADA SEKTOR UTAMA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**EMILY NUR SAIDY**  
A013191007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal **08 Juli 2024**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui



**Prof. Muhammad Amri, S.E., M.A., Ph.D**  
NIP : 19660118 199002 1 001

Co.Promotor I



**Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si**  
NIP: 19690413 199403 1 003

Co.Promotor II



**Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si**  
NIP: 19660811 199103 2 001

Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Ekonomi



**Dr. Madris, SE., DPS., M.Si**  
NIP: 19601231 198811 1 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si**  
NIP: 19640205 198810 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emily Nur Saidy  
No. Induk Mahasiswa : A013191007  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Jenjang Pendidikan : Doktor (S3)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

DETERMINAN PENYALURAN KREDIT PERBANKAN PADA SEKTOR  
UTAMA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Disertasi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 6 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,



*Emily Nur Saidy*  
EMILY NUR SAIDY

## PRAKATA

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan keridhoan-Nyalah sehingga disertasi ini bisa terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disertasi ini merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Ekonomi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam proses penyelesaian pendidikan program doktor ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan permasalahan selama proses perkuliahan hingga penulisan disertasi. Dalam proses Pendidikan dan penulisan disertasi ini banyak pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan, arahan dan bimbingan, untuk itu dalam prakata ini dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

Prof. Muhammad Amri, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Promotor, Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., selaku Kopromotor I, dan Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si selaku Kopromotor II yang telah mencurahkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberii bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada tim penguji kepada Prof. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D., Dr. Anas Iswanto Anwar,

S.E., M.Si., Dr. Hamrullah, S.E., M.Si., Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, S.E., M.Si atas semua saran dan kritik yang membangun kesempurnaan penelitian Disertasi ini dan juga tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Budiono, S.E., M.A., Ph.D. selaku penguji eksternal atas bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk memberikan masukan bagi penulis.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S3, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Madris, DPS., S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS atas motivasi serta arahan selama penulis menjalani proses pendidikan doktor Ilmu Ekonomi.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare. Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I IAIN Parepare, Dr. Firman, M.Pd. selaku Wakil Rektor II IAIN Parepare, Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. selaku Wakil Rektor III IAIN Parepare, Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Dr. Andi Bahri, M.E., M.Fil.I. selaku Wakil Dekan I, Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Ahmad Dzul

Ilmi, M.E. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah IAIN Parepare.

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Nurman Said, M.A dan Ibunda Rahmatia Rauf, S.E. Serta Ayah mertua bapak Taswin, S.Ag dan ibu Mertua ibu Hatija atas doa , kasih sayang, dan supportnya baik dalam bentuk mareri maupun moril selama proses memperoleh gelar doktor. Serta kepada adik kandung penulis, Kakak-kakak Ipar dan seluruh keluarga besar penulis keluarga Said dan Keluarga Rauf terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini.

Dan amat teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada Suami tercinta Dr. Mubarak Taswin, M.Fil.I, anak-anakku tersayang Aysar Sireyl Murteza dan Isa Eiman Murtesa atas kasih sayang, perhatian, dukungan, kesediaannya untuk ikut serta membarengi penulis dalam proses penyelesaian disertasi dan selalu menghibur penulis.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman S3 Ilmu Ekonomi Angkatan 2019 UNHAS, teman-teman dosen di IAIN Parepare khususnya teman-teman PNS Angkatan 2019, teman-teman dosen di UIN Alauddin Makassa. Dan juga teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tanpa dukungan mereka semua penulis tidak akan mampu menyelesaikan disertasi ini meskipun Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam disertasi

ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dalam rangka penyempurnaan Disertasi ini.

Makassar, 11 Januari 2024

Emily Nur Saidy

## ABSTRAK

EMILY NUR SAIDY. *Determinan Penyaluran Kredit Perbankan pada Sektor Utama dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Muhammad Amri, Sanusi Fattah, dan Sri Undai Nurbayani).

Penelitian ini bertujuan mengukur dan menganalisis pengaruh *non-performing loan*, *loan to deposit ratio*, dana pihak ketiga, Bank Indonesia 7 Day Repo Rate, kurs, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama meliputi: sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan Sektor pedagang besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data tersebut berupa data *time series* mulai periode triwulan I 2012 - triwulan IV 2021. Metode yang digunakan ialah metode struktural dengan *software R studio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non-performing loan* berpengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor. Namun, berpengaruh positif dan signifikan melalui kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dana pihak ketiga, dan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama. Bank Indonesia 7 Day Repo Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, dan sektor industri pengolahan. Namun, berpengaruh positif dan signifikan melalui sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sedangkan berpengaruh positif dan signifikan melalui kredit pada sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kata kunci: penyaluran kredit, pertumbuhan ekonomi, sektor utama, NPL.LDR, DPK, Bank Indonesia 7 DRR, kurs, inflasi



## ABSTRACT

EMILY NUR SAIDY. *Determinants of Banking Credit Distribution in Main Sectors in Encouraging Regional Economic Growth in South Sulawesi Province* (supervised by Muhammad Amn, Sanusi Fattah and Sri Undal Nurbayani)

This research aims to measure and elucidate the influence of Non-Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Third Party Funds, Bank Indonesia 7 Day Repo Rate, exchange rate and inflation on the economic growth either directly or indirectly through the bank credit distribution in the main sectors including the agricultural plantations and fishery sector, the processing industry sector, the construction sector and the Wholesaler and Retail Car and Motorcycle Repair sector. The data used were the secondary data obtained through the websites of the Central Statistics Agency and Bank Indonesia. The data were in the forms of the time series data from the first quarter of 2012 to the fourth quarter of 2021. The research used the structural method with R studio software. The research result indicates that the Non-Performing Loans have the negative and significant effect on the economic growth through the credit distribution in the processing industry sector, the construction sector and the wholesale and retail trade, including car and motorbike repair sector, but they have the positive and significant influence through the credits in the agricultural, forestry and fishery sectors. The Loan to Deposit Ratio (LDR), Third Party Funds and the exchange rate have the positive and significant effect on the regional economic growth through the distribution of bank credits to the main sectors. The BI 7 Day Repo Rate has the negative and significant influence on the economic growth through the bank credit distribution to the agriculture, plantation and fishery sectors and the processing industry sector. However, it has the positive and significant effect through the construction sector and the wholesale and retail trade, car and motorbike repair sectors. The inflation has the negative and significant influence on the economic growth through the bank credit distribution to the agricultural, plantation and fishery sectors. While, it has the positive and significant effect through the credit in the processing industry sector, the construction sector and the Wholesaler and Retail, Car and Motorcycle Repair sectors.

Key words: credit distribution, economic growth, main sector, NPL, LDR, DPK, BITDAR, exchange rate, inflation



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian .....	20
1.4 Manfaat Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
2.1 Teori Pertumbuhan Tidak Berimbang .....	23
2.1.1 Teori Tidak Berimbang Albert Hirschman .....	24
2.2 Teori kutub Pertumbuhan ( <i>Growth Pole</i> ).....	27
2.3 Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Kredit .....	29
2.4 Penyaluran Kredit Perbankan .....	31
2.3.1. Kredit Modal Kerja .....	32
2.3.2. Kredit Investasi .....	33
2.3.3. Kredit Konsumsi .....	35
2.4. Kredit Bermasalah ( <i>Non Performing Loan</i> ) .....	35
2.5. <i>Loan to Deposit Ratio</i> .....	38
2.6. Dana Pihak Ketiga .....	41
2.7. Bank Indonesia <i>7 Day Repo Rate</i> .....	43
2.8. Kurs ( <i>Exchange Rate</i> ).....	46
2.9. Inflasi.....	48
2.10. Keterkaitan Teoretis dengan Variabel Penelitian .....	50
2.10.1. Hubungan <i>Non Performing Loan</i> Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	50
2.10.2. Hubungan <i>Loan to deposit ratio</i> Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	52
2.10.3. Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	55
2.10.4. Hubungan BI 7 DRR (BI Rate) Terhadap Penyaluran	

Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	57
2.10.5. Hubungan Kurs Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	60
2.10.6. Hubungan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit .....	65
2.10.7. Hubungan Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	67
2.11. Studi Empiris terkait Penelitian Sebelumnya .....	68
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>73</b>
3.1 Kerangka Konseptual .....	73
3.2 Kerangka Pikir .....	74
3.3 Hipotesis .....	75
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	77
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	77
4.3 Jenis dan Sumber Data .....	78
4.4 Model Analisis .....	78
4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	84
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
5.1 Deskripsi Data .....	87
5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan .....	87
5.1.2 Penyaluran Kredit Perbankan Pada Sektor-Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan .....	89
5.1.3 <i>Non Performing Loan</i> .....	91
5.1.4 <i>Loan to Deposit Ratio</i> .....	93
5.1.5 Dana Pihak Ketiga .....	94
5.1.6 Bank Indonesia (BI) <i>7 Day Repo Rate/ BI Rate</i> .....	95
5.1.7 Kurs .....	97
5.1.8. Inflasi .....	99
5.2 Deskripsi Hasil Statistik .....	100
5.2.1 Pengaruh Langsung .....	100
5.2.2 Pengaruh Tidak Langsung .....	114
<b>BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>117</b>
6.1 Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional melalui Penyaluran Kredit Pada Sektor Utama di Provinsi Sulawesi Selatan .....	117
6.2 Pengaruh <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional melalui Penyaluran Kredit Pada Sektor Utama di Provinsi Sulawesi Selatan .....	121

6.3	Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional melalui Penyaluran Kredit Pada Sektor utama di Provinsi Sulawesi Selatan.....	124
6.4	Pengaruh <i>BI 7 Day Repo Rate</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional melalui Penyaluran Kredit Pada Sektor Utama di Provinsi Sulawesi Selatan.....	126
6.5	Pengaruh Kurs terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional melalui Penyaluran Kredit Pada Sektor Utama di Provinsi Sulawesi Selatan.....	130
6.6	Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional melalui Penyaluran Kredit Pada Sektor Utama di Provinsi Sulawesi Selatan.....	132
6.7	Pengaruh Penyaluran Kredit Pada Sektor Utama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Sulawesi Selatan.....	136
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>		<b>139</b>
7.1.	Kesimpulan .....	139
7.2.	Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>145</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021 .....	8
Tabel 1.2 Kontribusi Sektor-sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 .....	10
Tabel 1.3 Penyaluran Kredit (Lokasi Bank) Menurut Sektor Ekonomi (Milyar Rupiah) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 .....	11
Tabel 2.1 Peta Studi Empiris Sebelumnya.....	69
Tabel 5.1 Distribusi PDRB Sulawesi Selatan Menurut Sektor .....	89
Tabel 5.2 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung .....	103
Tabel 5.3 Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung.....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021 .....	7
Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	74
Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan .....	88
Gambar 5.2 Bank Umum di Sulawesi Selatan .....	90
Gambar 5.3 Perkembangan Penyaluran Kredit di Sulawesi Selatan .....	91
Gambar 5.4 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) di Sulawesi Selatan.....	92
Gambar 5.5 Perkembangan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Pada Bank Umum di Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021 .....	93
Gambar 5.6 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021.....	95
Gambar 5.7 Perkembangan BI 7 DRR Tahun 2012-2021 di Sulawesi Selatan.....	97
Gambar 5.8 Perkembangan Kurs Dollar Amerika (USD) Terhadap Rupiah .....	98
Gambar 5.9 Inflasi Tahunan Provinsi Sulawesi Selatan .....	99
Gambar 5.10 Hasil Estimasi Pengaruh Antar Variabel .....	113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro, 2000).

Tolok ukur perekonomian suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Todaro (2000), pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multi dimensional mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi,

pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan manusia merupakan proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Proses pembangunan tersebut memiliki beberapa tujuan meliputi berbagai perubahan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti tujuan keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain cukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*), merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat dalam memilih berbagai variabel pilihan yang ada.

Pada pembangunan ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah jauh lebih spesifik (Tambunan, 2001). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya - sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad ,2010).

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum

sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Munculnya sektor-sektor perekonomian antara lain sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan, sektor industri, sektor listrik, gas, dan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel, sektor pengangkutan, pergudangan, sektor jasa dunia usaha, sektor jasa sosial/masyarakat dan lain-lain di masyarakat dan daerah memberikan *share* kepada peningkatan produk domestik regional bruto. Peningkatan sektor-sektor tersebut harus didukung oleh sumber pembiayaan guna peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu sumber pembiayaan yang dikenal dan dimanfaatkan menunjang perekonomian yaitu sektor perbankan.

Menurut Lee (2005), sedikitnya ada dua kemungkinan hubungan antara variabel keuangan dan variabel riil. Pertama, perkembangan sektor keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan akan produk sektor keuangan sehingga aktivitas pasar keuangan dan kredit meningkat. Dengan ini dapat dikatakan bahwa sektor keuangan sebagai *demand-following*. Kedua, perkembangan sektor keuangan merupakan determinan dari pertumbuhan ekonomi. Dimana perkembangan keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan.

Perkembangan sektor keuangan terutama perbankan memiliki sebuah peranan penting dalam pembiayaan modal investasi untuk mendorong perekonomian sebuah negara sesuai dengan salah satu

fungsinya yaitu sebagai lembaga intermediasi. Hal yang melatarbelakangi perkembangan sektor keuangan adalah kebijakan Paket Juni (PAKJUN) 1983 tentang pemberian kebebasan perbankan untuk menetapkan suku bunga deposito dan kredit; dan Paket Oktober (PAKTO) 1988 tentang peningkatan kompetisi sektor keuangan dengan pengurangan hambatan pendirian bank baru.

Sektor keuangan mempunyai peranan penting yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang direfleksikan dalam tingkat pertumbuhan output riil yang tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan sumber pendanaan untuk mendorong dunia usaha. Kebutuhan dana yang tidak sedikit sebagai modal pembangunan ini sangat ditentukan oleh perbankan. Hal ini tampak jelas adanya perkembangan jumlah kredit bank sebagai sumber pendanaan sektor-sektor usaha tersebut sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Kegiatan perbankan mempunyai posisi yang penting dalam konteks perekonomian makro. Selain melaksanakan fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter bank sentral. Penyaluran kredit merupakan fokus utama kegiatan perbankan dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, aspek perkreditan tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

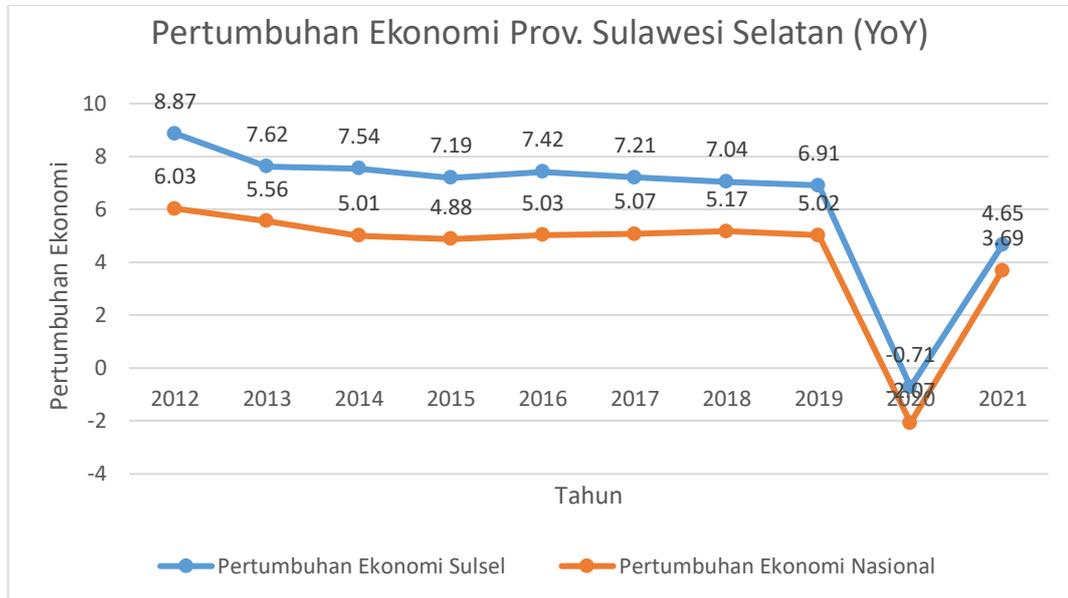
Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan output agregat (Bencivenga & Smith, 1991); (Hung & Cothren, 2002). Kredit perbankan yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh perbankan maka akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam hal ini kredit yang disalurkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Dwiastuti, 2020).

Salah satu peran kredit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengalokasikan pemberian kredit menurut prioritas pembangunan ekonomi sehingga dapat memperluas pemerataan hasil pembangunan. Implikasi kredit perbankan berdasarkan data yang ada terhadap pembangunan ekonomi setidaknya berpengaruh pada dua hal. Pertama, kredit perbankan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua, kredit perbankan berperan dalam mendorong peningkatan pembiayaan investasi dan modal unit usaha sehingga kapasitas dan produktivitas perekonomian menjadi lebih besar. Dari kedua hal tersebut efek selanjutnya dari kredit perbankan adalah adanya peningkatan pendapatan nasional akibat dari meningkatnya konsumsi dan

investasi masyarakat secara keseluruhan sehingga mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu wilayah fungsional, Sulawesi Selatan termasuk bagian pusat kegiatan ekonomi khususnya di Kawasan Timur Indonesia (Bulohlabna, 2008); (Danastri, 2011); (Haryono, n.d.). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Selama tahun 2012- 2019 berada dikisaran 7 – 8 persen namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi tajam hingga pertumbuhan ekonomi mencapai -0,71 persen hal ini merupakan dampak akibat pandemi Covid-19 namun mulai membaik di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada dikisaran 5 persen dan pada saat Covid-19 mengalami kontraksi hingga mencapai -2,07 persen. Begitupun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat tumbuh 4,65 persen (yoy) sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen (yoy). Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 1.1** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021



Sumber : Bank Indonesia (2022)

Jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 memang tampak mengalami kontraksi hampir pada semua lapangan usaha, namun di tahun 2021 perekonomian di Sulawesi Selatan mulai berangsur pulih terlihat dari nilai PDRB yang mengalami peningkatan hampir di semua sektor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10, 87 persen. Namun terdapat juga sektor yang mengalami kontraksi di tahun 2021 salah satunya di sektor pertambangan dan penggalian. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1** Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021 (persen)

Lapangan Usaha	2020					2021				
	I	II	III	IV	2020	I	II	III	IV	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,43	0,16	-3,49	0,64	-0,71	7,33	3,04	7,39	8,40	6,40
B. Pertambangan dan Penggalian	12,59	1,23	-0,54	-9,41	0,54	-9,57	-5,53	3,68	9,53	-0,59
C. Industri Pengolahan	-2,73	-8,38	-2,12	-5,15	-4,57	-1,92	4,46	1,69	7,71	3,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	7,91	2,31	-4,56	2,59	0,67	6,19	9,65	26,48	10,87
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,71	3,12	7,34	8,92	6,61	1,00	2,91	6,30	5,98	4,07
F. Konstruksi	5,43	-4,94	0,85	4,82	1,56	-2,22	7,80	4,53	6,26	4,14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,93	-5,12	-0,99	-4,22	-3,07	-3,13	7,28	3,90	17,53	6,50
H. Transportasi dan Pergudangan	3,26	-50,83	-26,29	-11,76	-21,46	-19,44	73,95	-3,31	2,78	5,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,56	-30,83	11,62	-12,31	-13,68	-9,70	26,52	-6,97	8,12	2,96
J. Informasi dan Komunikasi	9,79	10,48	12,20	10,84	10,84	8,73	6,63	4,96	5,40	6,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,50	0,88	0,43	-1,43	2,43	-1,18	7,48	0,67	-2,08	1,14
L. Real Estat	5,39	4,32	4,24	1,33	3,79	1,17	2,85	2,15	4,13	2,58
M,N. Jasa Perusahaan	3,66	-27,34	-8,10	-8,14	-10,05	-4,82	29,83	-3,12	8,88	6,23
O. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,03	-0,03	-2,30	-4,15	-0,04	0,42	15,40	-8,27	3,82	2,92
P. Jasa Pendidikan	7,21	6,65	4,74	4,52	5,73	0,75	12,69	-0,89	2,34	3,67
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,42	-0,79	7,97	22,98	10,06	2,32	16,18	7,45	6,12	7,77
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,62	-27,45	11,94	-9,86	-12,02	-5,44	27,77	0,94	11,56	7,56
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>3,05</b>	<b>-3,89</b>	<b>-1,12</b>	<b>-0,63</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,21</b>	<b>7,70</b>	<b>3,25</b>	<b>7,89</b>	<b>4,65</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Adapun sektor-sektor lapangan usaha yang paling berkontribusi terhadap PDRB di Sulawesi Selatan berdasarkan dari tahun 2019-2021 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor lain yang juga memberi kontribusi cukup besar terhadap PDRB Sulawesi Selatan adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Secara keseluruhan keempat sektor tersebut berkontribusi terhadap PDRB sebesar 64,03 persen. Sedangkan 13 sektor lain meliputi sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib , sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya hanya menyumbang sebesar 35,97 persen terhadap total PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 1.2** Kontribusi Sektor-Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022 (persen)

Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,35	21,72	22,55
B. Pertambangan dan Penggalian	4,62	4,67	4,75
C. Industri Pengolahan	13,17	12,76	12,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,1	0,10
F. Konstruksi	14,11	14,37	14,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,8	14,48	14,58
H. Transportasi dan Pergudangan	4,21	3,07	3,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,25	1,2
J. Informasi dan Komunikasi	5,05	5,62	5,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,75	3,63
L. Real Estat	3,65	3,81	3,62
M,N. Jasa Perusahaan	0,47	0,43	0,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,63	4,71	4,53
P. Jasa Pendidikan	5,26	5,6	5,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	2,31	2,35
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,45	1,29	1,3
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100

Sumber :Badan Pusat Statistik (2023)

**Tabel 1.3** Penyaluran Kredit Menurut Sektor Ekonomi (Milyar Rupiah) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021

Periode	Kredit										Total
	Pertanian	Tambang	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan	Angkutan	Jasa Dunia Usaha	Jasa Sosial Masyarakat	Lain-lain	
<b>2019</b>											
TW 1	5.343	452	7.413	220	5.786	35.688	2.223	5.418	3.414	52.773	118.731
TW 2	5.571	517	7.483	204	6.070	36.319	2.178	5.624	3.327	53.736	121.030
TW 3	5.959	476	7.772	194	6.227	36.285	2.282	5.624	3.434	54.610	122.863
TW 4	5.958	490	4.652	187	6.390	36.507	2.406	5.616	3.437	55.252	120.894
<b>2020</b>											
TW 1	6.442	467	4.664	176	5.380	36.090	2.370	5.506	3.340	55.952	120.387
TW 2	6.612	455	4.721	173	5.386	35.050	2.414	5.360	3.295	55.328	118.793
TW 3	7.092	405	4.895	179	5.356	35.480	2.309	5.175	3.138	56.002	121.032
TW 4	7.402	408	5.028	594	5.347	35.936	3.147	4.940	3.209	56.545	122.556
<b>2021</b>											
TW 1	7.679	383	5.079	609	4.988	36.391	3.082	4.906	3.249	56.740	123.111
TW 2	8.174	381	5.084	597	5.157	36.180	3.196	4.709	3.375	57.180	124.032
TW 3	8.813	452	5.223	576	5.234	36.759	2.030	4.662	3.393	57.536	124.642
TW 4	9.649	472	5.362	573	5.051	37.719	1.922	4.498	3.584	58.112	126.947

Sumber : Bank Indonesia (2022)

Dari sisi penyaluran kredit perbankan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.3 . Pada tahun 2020 terutama pada triwulan 2 akibat dari pandemi Covid-19 terjadi penurunan penyaluran kredit perbankan hampir di semua sektor kecuali pada sektor pertanian. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama terlihat pada tahun 2020 triwulan ke-3 penyaluran kredit terus tumbuh hingga triwulan ke-4 tahun 2021. Adapun sektor-sektor yang memperoleh penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebagaimana tabel 1.2 keempat sektor ini merupakan sektor utama yang

memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Semakin besar sumbangan atau peran suatu sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian suatu daerah.

Dalam teori pembangunan tidak berimbang menyatakan bahwa investasi harus dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur bergerak dari lintasan pembangunan tidak berimbang ke arah pembangunan berimbang. Jadi pembangunan akan menjalar dari sektor utama ekonomi ke sektor pendukungnya, dari satu industri ke industri lainnya, dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya (Jhingan, 1988). Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi selalu dihadapkan kepada kondisi pembiayaan yang terbatas.

Pembangunan yang berorientasi kepada sektor utama meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan penambahan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga sektor utama diharapkan dapat memimpin pembangunan ekonomi dalam proses

tahapan lepas landas yang memberikan pertumbuhan dan perubahan ke arah tahapan pembangunan selanjutnya.

Meskipun sektor pertanian, perkebunan dan perikanan memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yakni berkisar diatas 20 persen. Namun penyaluran kredit pada sektor tersebut masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan besarnya kredit yang disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mestinya mampu mendorong peningkatan produksi yang lebih besar namun realitanya sektor ini hanya mampu menyumbang sebesar 14 persen terhadap total PDRB Sulawesi Selatan.

Menurut Malayu (2001) kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali beserta bunganya oleh pihak debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain-lain (Anggraini dan fathurrahman, 2018). Adapun faktor internal yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan meliputi *Non Performing Loan (NPL)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, Dana Pihak Ketiga dan *BI Rate*. Sementara faktor

eksternal yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan meliputi inflasi dan kurs.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khasanah dan Meiranto (2015) kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), Pinjaman Rasio Deposito (LDR), Kredit Bermasalah (NPL), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemberian kredit. Selain itu penyaluran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh inflasi, kurs dan BI rate (Haryati, 2009).

Menurut Diulio (1993) menyebut risiko kredit sebagai salah satu risiko keuangan yakni risiko cedera janji. Risiko ini dapat terjadi karena debitur tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian kredit seperti kelambatan membayar bunga, kelambatan membayar pokok pinjaman, atau bahkan tidak membayar sama sekali karena bangkrut sehingga akan mengakibatkan pinjaman yang dikembalikan lebih sedikit dari yang dijanjikan debitur. Risiko kredit yang dihadapi bank syariah didefinisikan sebagai kegagalan nasabah dalam memenuhi liabilitas kepada bank syariah sesuai kewajiban. Risiko ini juga disebut risiko gagal bayar (*default risk*) atau disebut pula risiko pembiayaan (*financing risk*) (Wahyudi dkk, 2013).

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali

debitur. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 menetapkan nilai maksimum NPL sebesar 5 persen. (Putri dan Akmalia, 2016)

*Loan to Deposit Ratio* juga mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan investasi (Darmawi, 2014). LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang diterima oleh bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Budisantoso dkk., 2015). Setiap terjadi kenaikan *Loan to Deposit Ratio* maka Bank Umum juga akan menaikkan penyaluran kredit untuk meningkatkan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian Akbar (2023) yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen LDR akan mendorong peningkatan kredit sebesar 1,14 persen, begitu pula sebaliknya penurunan LDR 1 persen akan mengakibatkan penurunan kredit sebesar 1,14 persen dengan asumsi variabel lain tetap ada. Sehingga apabila LDR tinggi, maka penyaluran kredit akan bertambah, sebaliknya LDR rendah, maka penyaluran kredit akan mengalami penurunan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dibutuhkan oleh bank untuk menjalankan operasi usahanya. DPK merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80–90 persen dari seluruh dana yang dikelola bank). Dana pihak ketiga dapat dimanfaatkan oleh bank untuk ditempatkan pada pos–pos yang menghasilkan pendapatan, salah satunya adalah kredit (Prabowo, 2014). Menurut Teori Penawaran Kredit Bank yang

dikembangkan oleh Melitz dan Perdue (1973), dana pihak ketiga merupakan sumber terbesar yang dimiliki oleh bank, selanjutnya sumber dana ini dikelola bank dengan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga bank, maka semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkan bank.

BI *rate* merupakan suku bunga kebijakan yang menggambarkan langkah kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI yang diumumkan kepada publik (Putra & Rustariyun, 2014). Meningkatnya BI *rate* akan mengakibatkan suku bunga kredit pada bank akan meningkat, sehingga keinginan masyarakat dalam meminjam uang akan berkurang (Putra & Rustariyun, 2014). Sehingga apabila BI *rate* naik, maka penyaluran kredit akan menurun, sebaliknya jika BI *rate* turun, maka penyaluran kredit akan meningkat.

Menurut Wahyudi, dkk (2013) menyebutkan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah dinilai dari aspek kredit dikarenakan siklus bisnis dan industri yang menurun. Selain itu penyebab kredit gagal dinilai dari faktor eksternal disebabkan karena kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan. Indikator risiko kredit yang diadaptasi dan disesuaikan dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 11 Oktober 2011 juga menyebutkan faktor eksternal dengan parameter atau indikator perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi ataupun regulasi yang

mempengaruhi nilai tukar, siklus usaha debitur dan berdampak pada kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharani, dkk (2017) disebutkan bahwa penyaluran kredit juga dipengaruhi oleh kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa semakin tinggi kurs, maka penyaluran kredit juga akan semakin banyak. Sebab, investor asing yang masuk ke Indonesia besar dan dana yang digunakan untuk kredit akan lebih bervariasi. Meskipun demikian, Triastuti dkk (2023) dalam penelitian yang lebih terkini menyebut bahwa kurs tidak berpengaruh negatif.

Variabel Makro yakni tingkat inflasi merupakan komponen yang juga mampu mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Peristiwa inflasi ini mengakibatkan sebuah ketidakpastian bagi masyarakat, oleh karena itu banyak dari mereka mengambil tindakan dengan cara mengubah asset yang dimiliki menjadi asset riil atau asset yang nilainya cenderung tidak mengalami penurunan tajam seperti emas, tanah, dan sebagainya. Masyarakat lebih memilih membelanjakan uangnya pada hal non-produktif sehingga mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya. Sehingga berdampak pada menurunnya kredit yang disalurkan oleh perbankan. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Inflasi terhadap penyaluran kredit pernah dilakukan oleh Haasanudin dan Prihatiningsih (2011) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR Jawa Tengah.

Pada penelitian Beck & Levine (2004), menunjukkan bahwa tidak hanya kredit perbankan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh pasar modal secara positif. Penelitian Fabya (n.d.), menunjukkan bahwa nilai kredit swasta memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tabungan dianggap lebih berpengaruh ketimbang kredit secara statistik pada hasil penelitian ini. Penelitian Onder & Ozyildirim (2013), menunjukkan bahwa penyaluran dana pinjaman di pasar kredit signifikan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal pada semua provinsi di Turki. Sedangkan pada penelitian Ductor & Grechyna (2015), menunjukkan dampak perkembangan finansial terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung kepada pertumbuhan kredit swasta atas pertumbuhan output riil. Hal ini menjelaskan bahwa kredit perbankan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jika kredit digunakan pada sektor riil.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melihat lebih jauh “Determinan Penyaluran Kredit Perbankan Pada Sektor Utama dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Sulawesi Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung

atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama?

2. Bagaimana pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama?
4. Bagaimana pengaruh Bank Indonesia *7 Day Repo Rate* (BI7DRR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama?
5. Bagaimana pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama?
6. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada pada sektor utama?
7. Bagaimana pengaruh penyaluran kredit perbankan pada sektor utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merujuk pada variabel yang dimasukkan ke dalam model penelitian sehingga tujuan yang diharapkan adalah

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung penyaluran kredit perbankan pada sektor utama.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama.
4. Untuk mengukur dan menganalisis Bank Indonesia 7 Day Repo Rate (BI7DRR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama.
5. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama.

6. Untuk mengukur dan menganalisis inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penyaluran kredit perbankan pada sektor utama.
7. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh penyaluran kredit perbankan pada sektor utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoretis**

Untuk memperkaya khasanah keilmuan yang berhubungan terkait ilmu ekonomi khususnya mengenai pengaruh penyaluran kredit perbankan pada sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang dipengaruhi oleh *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga yang diukur dari BI *7 Day Repo Rate*, kurs dan inflasi,

##### **2. Secara Praktis**

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan perbankan dalam mengembangkan kinerja sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan memperkuat penelitian yang mengkaji masalah serupa sebelumnya.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan dalam menentukan arah dan strategi kedepannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Pertumbuhan Tidak Berimbang (*Unbalance Growth*)

Teori pertumbuhan tidak berimbang muncul atas kritikan terhadap pertumbuhan berimbang. Teori pertumbuhan berimbang berhipotesis bahwa pemerintah negara-negara terbelakang perlu melakukan investasi besar di seluruh sektor secara bersamaan (Cryper, 2009). Hal tersebut dinilai akan membantu memperbesar ukuran pasar nasional maupun internasional, meningkatkan produktivitas, dan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi (Hayami, 2005) serta menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan (Arsyad, 2010). Namun praktiknya hal tersebut sulit dilakukan karena tidak ada satupun negara sedang berkembang mempunyai modal dan sumberdaya yang sedemikian besarnya untuk dapat melakukan investasi secara serentak pada semua sektor ekonomi. Sehingga menurut teori pertumbuhan tidak berimbang, investasi seyogyanya hanya dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi agar cepat berkembang dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, perekonomian akan secara berangsur bergerak dari lintasan pembangunan tak seimbang ke arah pembangunan seimbang. (Arsyad, 2010)

Sulitnya untuk melakukan investasi di segala sektor karena keterbatasan sumberdaya manusia, bahan mentah maupun modal untuk melakukan investasi secara serempak pada semua sektor/industri yang saling melengkapi. Oleh karena itu, investasi harus ditanamkan pada sektor-sektor tertentu saja yang dinilai akan memberikan hasil terbaik agar investasi cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan pada sektor lain, konsep ini kemudian lebih dikenal sebagai konsep pertumbuhan tidak berimbang. Konsep ini dikemukakan oleh Hirschman, Streeten dan beberapa ahli lain.

#### **2.1.1. Teori Tidak Berimbang Albert Hirschman**

Menurut Albert O, Hirschman (1958) investasi pada satu industri ataupun sektor-sektor yang strategis dinilai akan membuka kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi proses pembangunan selanjutnya. Hirschman memandang bahwa pembangunan merupakan suatu rantai disequilibrium yang harus dipertahankan, bukan dihapuskan. Ketika proyek (investasi) baru dimulai, proyek-proyek tersebut memperoleh eksternalitas ekonomi yang diciptakan oleh proyek-proyek sebelumnya, dan proyek baru tersebut juga akan menciptakan eksternalitas ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan proyek-proyek selanjutnya.

Dalam tulisannya *the strategy of Economic Development*, Hirschman (1958) mengaitkan antara industrial dengan pertumbuhan tidak berimbang. Negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam hal sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga

membutuhkan prioritas investasi untuk mengawalinya. Menurut Hirschman (1958) *Big Push* harus ditujukan pada beberapa industri saja untuk mendorong pertumbuhan tidak berimbang, dalam beberapa hal selalu terjadi kecenderungan tidak berimbang. Misalnya beberapa sektor yang disorong investasi mungkin saja mengalami *overcapacity*, *outputnya* menjadi murah karena *economic of scale*. Akibat selanjutnya adalah peralihan investasi hulu (*upstream investment*).

Dengan meyakini akan adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain (*backward dan forward linkage industry*) maka investasi pada satu sektor akan bergerak dan menghela sektor lain. Untuk memungkinkan hal ini terjadi, yang diperlukan adalah evaluasi berkala. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mereviu apakah investasi perlu diteruskan atau dialihkan pada bidang lain. Dasar pemikiran yang juga melatarbelakangi konsep pembangunan selektif adalah keyakinan Hirschman bahwa kondisi tidak berimbang (disekuilibrium) mendorong dinamika pembangunan sehingga pembangunan itu dilaksanakan secara tidak berimbang (*unballance*) (Jhingan, 2007).

Dalam penentuan prioritas investasi harus menentukan sektor andalan yang ditentukan berdasarkan kaitan industrial kedepan maupun kebelakang. Dengan membuat skala prioritas investasi yang tepat, perekonomian akan berputar terus dan proyek-proyek baru yang dia sebut sebagai *induced investment* akan berjalan memanfaatkan eksternalitas ekonomi maupun *social overhead capital* dari proyek sebelumnya.

Menurut Hirschman dalam Jhingan (2007) , pola pertumbuhan tidak seimbang ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan yaitu: 1) Secara historis, proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi mempunyai corak yang tidak seimbang. 2) Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia. 3) Pertumbuhan tidak berimbang akan berpotensi untuk menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunannya, tetapi hal tersebut dinilai akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

Meskipun pada awalnya pembangunan tidak seimbang ini akan menciptakan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi, tetapi keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan demikian, pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang (Arsyad, 2010).

Hirschman dalam Jhingan (2007) mengemukakan bahwa pembangunan tidak seimbang lebih tepat digunakan dalam mempercepat proses pembangunan dinegara-negara sedang berkembang. Menurut Hirschman dalam Muttaqin (2005), investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Dia berpendapat bahwa pembangunan memang harus berlangsung dalam cara ini, yaitu dengan pertumbuhan yang mengukur dari sektor utama ekonomi ke sektor pendukungnya, dari satu industri ke industri lainnya, dari

satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Konsep pertumbuhan tidak berimbang juga mempunyai keterbatasan dalam menggambarkan dan mengatasi permasalahan ekonomi di negara berkembang. Namun para ahli menilai bahwa dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang lebih cocok untuk menerapkan konsep pertumbuhan tidak berimbang, sedangkan konsep pertumbuhan berimbang lebih cocok untuk diterapkan di negara-negara maju (Jhingan, 2007).

## **2.2. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole*)**

Teori kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Perancis Perroux pada tahun 1950 dengan teorinya yang dikenal sebagai *pole de croissance*. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara serentak di setiap tempat. Pertumbuhan tersebut muncul di pusat-pusat pertumbuhan yang diciptakan dan memiliki intensitas yang berbeda-beda yang disebut sebagai pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan regional terdiri dari kumpulan industri-industri yang berkembang dan saling terkait, cenderung membentuk aglomerasi yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi eksternal (Arsyad, 1999).

Perroux (1970) menjelaskan bahwa sebuah kutub pertumbuhan adalah sekelompok industri yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena adanya keterkaitan kemuka (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat dengan industri unggulan. Dia menyatakan bahwa kumpulan industri ini cenderung memilih lokasi yang terpusat di

kota-kota besar dan didukung oleh daerah belakang (*hinterland*) yang kuat. Sebuah wilayah yang berpotensi adalah wilayah yang belum berkembang atau belum berkembang sama sekali namun memiliki faktor-faktor potensial untuk berkembang dengan cepat jika ada perkembangan.

Adanya pusat pertumbuhan (*growth pole*) akan menghasilkan efek-efek trickling down dan polarisasi dalam pertumbuhan ekonomi. Efek-efek trickling down dan polarisasi dalam pertumbuhan ekonomi ditemukan oleh Hirschman (1958). Menurutnya, karena adanya perbedaan potensi sumber daya yang tidak merata antara berbagai wilayah di dalam suatu negara, maka pertumbuhan wilayah-wilayah tersebut tidak akan seragam. Untuk mencapai pertumbuhan yang cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi yang paling kuat.

Menurut Arsyad (1999), inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut:

1. Pusat pertumbuhan muncul ketika terdapat industri unggulan yang menjadi penggerak utama pembangunan di suatu daerah.
2. Pemusatan industri di suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah.
3. Daerah yang relatif maju atau aktif (yang memiliki industri unggulan) akan memberikan pengaruh kepada daerah-daerah yang relatif pasif (yang tergantung pada industri unggulan/pusat pertumbuhan).

Kutub pertumbuhan (*growth pole*) merupakan potensi bagi perkembangan ekonomi yang ada dan mampu menarik unsur-unsur ekonomi yang sebelumnya tidak ada, sehingga dapat memulai suatu proses perkembangan baru. Oleh karena itu, kutub pertumbuhan sering dijadikan bagian dari kebijakan ekonomi dalam strategi pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini memungkinkan perencanaan arah kebijakan pembangunan yang lebih terfokus terhadap daerah-daerah yang memiliki industri unggulan (pusat industri), sambil mengatasi tantangan di daerah-daerah yang relatif kurang aktif, sehingga menciptakan keseimbangan antara daerah-daerah yang sudah maju dan yang belum.

### **2.3. Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan (Warjiyo, 2004). Taylor (1995) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah "*The process through which monetary policy decisions are transmitted into changes in real GDP and inflation*". Bernanke dan Gertler (1995) berpendapat bahwa dalam banyak penelitian sebelumnya membuktikan perubahan kebijakan moneter akan diikuti dengan perubahan sektor riil atau perubahan output, namun bagaimana mekanisme kebijakan moneter dapat

mempengaruhi sektor riil masih belum diketahui. Hal inilah yang menyebabkan mekanisme transmisi disebut sebagai "*black box*".

Menurut sebagian besar ahli ekonomi, bank atau lembaga perantara keuangan dalam perekonomian diyakini berperan sangat penting dalam mentransmisikan kebijakan moneter. Pendekatan awal dalam menjelaskan peranan bank dalam transmisi kebijakan moneter diyakini melalui jalur uang atau kewajiban sektor perbankan terhadap perekonomian (*money view*), kemudian berkembang pemikiran bahwa bank mempengaruhi perekonomian melalui jalur kredit (Bernanke dan Blinder, 1988). Dalam jalur kredit diyakini bahwa kebijakan moneter bisa mempengaruhi perekonomian melalui penawaran kredit dari perbankan (*bank lending channel*), dan melalui neraca perusahaan (*balance sheet channel*) dimana kebijakan moneter mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pembiayaan eksternal dari perbankan (Bernanke dan Gertler, 1995).

Sementara itu menurut Nier dan Zicchino (2008) penawaran kredit perbankan dipengaruhi oleh kerugian bank akibat *stance* kebijakan moneter yang berinteraksi dengan tekanan pada neraca bank (*balance sheet stress*). Dampak *stance* kebijakan moneter terhadap kerugian bank menjadi lebih kuat pada periode krisis, dengan asumsi bahwa risiko sektor keuangan semakin tinggi pada kondisi krisis. Hal ini menurut Dias dan Juhro (2011) disebut sebagai jalur peran risiko (*risk taking channel*) dalam transmisi kebijakan moneter. Jalur peran risiko mempengaruhi penawaran

kredit oleh perbankan melalui keputusan bank dalam menyalurkan kredit berdasarkan perilaku bank dalam menghadapi risiko. Jalur peran risiko secara tidak langsung mengindikasikan adanya interaksi antara kebijakan moneter dan risiko di sektor perbankan yang ditransmisikan ke perekonomian riil melalui penawaran kredit perbankan.

#### **2.4. Penyaluran Kredit Perbankan**

Kredit berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan berbunyi “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan”.

Menurut Taswan (2012) pengertian penyaluran kredit sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Sedangkan menurut Sudirman (2013) pengertian kredit yang disalurkan sebagai berikut :

“Kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha”.

Berdasarkan pengertian diatas maka penyaluran kredit yaitu kredit yang diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada waktu saat jatuh tempo.

#### **2.4.1. Kredit Modal Kerja**

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur, kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor, bangunan dan lain – lain. Menurut pendapat Kasmir (2012) bahwa kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit ini ditujukan untuk nasabah yang kekurangan modal kerja untuk usahanya. Faktor– faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal adalah tingkat penjualan dan perputaran modal kerja. Jika nasabah menginginkan kredit modal kerja berkesinambungan maka pihak bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja *revolving* yaitu kredit yang dapat diperpanjang masa berlakunya setelah jatuh tempo. Ada juga fasilitas kredit modal kerja transaksional yaitu kredit modal kerja yang dikeluarkan oleh bank bagi nasabah yang tidak memerlukan kredit modal kerja secara terus menerus tetapi hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Menurut Rivai (2021) manfaat dari kredit modal kerja yang diberikan bank adalah sebagai berikut :1) Modal awal untuk membangun sebuah usaha dari nol mulai dari pendirian usaha maupun keperluan. 2) Keperluan

usaha. - Modal bisa disimpan sehingga bisa digunakan sewaktu, 3) Waktu ketika dibutuhkan. 4) Bunga kredit hanya dikenakan pada uang yang sudah ditarik sehingga besarnya pembayaran kredit bias diatur. 5) Pembayaran secara bertahap dan bulanan yang relatif ringan tetapi jika belum membayar setelah jatuh tempo maka akan dikenakan denda sesuai yang telah disepakati.

#### **2.4.2. Kredit Investasi**

Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk dipergunakan melakukan investasi dengan membeli barang – barang modal. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk membiayai pengadaan barang – barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek. Menurut Firdaus dan Aryanti (2003) bahwa kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang – barang untuk modal tetap dan tahap lama seperti tanah dan bangunan, mesin – mesin, kendaraan dan sebagainya. Contohnya untuk membeli mesin – mesin, membeli tanah, membangun tempat usaha maupun kendaraan yang menunjang keberlangsungan usaha.

Adapun manfaat dari penggunaan kredit investasi bagi nasabah sebagai berikut : 1) Membantu nasabah dalam penyediaan kebutuhan modal. Mengajukan kredit investasi ini untuk meringankan kebutuhan modal tambahan disamping modal sendiri yang sudah ada sehingga debitur

memiliki modal yang cukup untuk mengelolah usahanya agar lebih berkembang. 2) Perekonomian perusahaan lebih stabil. Keuntungan usaha yang masih dalam jumlah terbatas menjadi kendala ketika ada kejadian yang tidak diinginkan atau mendadak. Keuntungan yang relatif kecil namun jumlah pengeluaran usaha setiap tahunnya terus ada dan bahkan meningkat. Membuat pengusaha memutuskan untuk mengakhiri usaha tersebut secara bertahap tetapi dengan memperbaiki sektor keuangan perusahaan akan sangat terbantu melalui kredit investasi yang mampu menguatkan sektor keuangan dengan lebih baik untuk stabil. 3) Membangun semangat mengembangkan usaha. Ketersediaan modal usaha yang terbatas membuat pengusaha tidak berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. Pasrah dengan kondisi perusahaan yang stagnan dan besarnya keuntungan yang tidak banyak atau nyaris tidak ada dengan begitu secara perlahan akan membuat usaha mudah tutup. Namun ketika mengajukan kredit investasi maka kebutuhan dana akan dengan mudah terpenuhi. Kemudian kesempatan untuk memperbesar skala usaha semakin luas dan semangat mengembangkan usahanya semakin memuncak. 4) Dapat melakukan inovasi produk yang lebih beragam. Dengan adanya kredit investasi pengusaha akan lebih mudah dalam berinovasi untuk memperbaiki kualitas dan jenis barang yang lebih beragam karena adanya tambahan modal untuk membeli keperluan lain yang dibutuhkan.

### **2.4.3. Kredit Konsumsi**

Kredit konsumsi yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Hal ini dikarenakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Menurut Bank Indonesia kredit konsumsi adalah pinjaman yang diberikan dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

Kemudian menurut Kasmir (2012) bahwa kredit konsumsi ini bersifat tidak produktif karena tidak ada penambahan dalam barang dan jasa yang dihasilkan sebab hanya digunakan oleh seseorang untuk keperluan pribadi sehingga suku bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah pada kredit untuk kegiatan konsumsi lebih besar dibandingkan dengan suku bunga kredit yang diberikan untuk tujuan usaha. Contoh penggunaan kredit konsumsi yaitu untuk membeli rumah, membeli kendaraan pribadi serta untuk membeli perabotan rumah tangga.

### **2.5. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)**

Menurut Herianto (2013) Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang terjadi karena tunggakan bunga atau angsuran pokok, seluruh kredit yang tergabung dalam tingkat kolektibilitas yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Kasmir (2012) kredit bermasalah atau kredit macet yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam

kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Berdasarkan pengertian diatas kredit bermasalah adalah total kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang diberikan.

Menurut Kasmir (2012) penggolongan Kredit Bermasalah yaitu: a) Lancar kriteria dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*). b) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) apabila memenuhi kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Mutasi rekening relatif aktif, Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan didukung oleh pinjaman baru. c) Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, frekuensi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan debitur, dokumentasi pinjaman lemah. d) Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga. dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. e) Macet (*Uncollectible*) Kriteria dikatakan macet apabila: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah, melampaui dua ratus tujuh puluh (270) hari. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur dan sisi bank sebagai berikut: 1) Dari sisi debitur yaitu sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan. Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank dan strategi usaha tidak sehat. Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepengawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan. 2) Dari sisi bank meliputi: a) Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitigasinya, serta timbulnya overfinancing (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur). b) Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah). c) Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur. d) Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun peningkatannya.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum. Rasio kredit bermasalah (NPL) secara neto lebih dari 5% dari total kredit. Artinya apabila tingkat kredit bermasalah pada suatu bank mencapai 5% atau lebih maka bank tersebut termasuk kategori bank dalam pengawasan intensif.

## 2.6. *Loan to Deposit Ratio*

*Loan to Deposit Ratio* merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank (Riyadi, 2015). Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari dana pihak ketiga dalam bentuk kredit. Jika dikembangkan lebih lanjut maka dibandingkan tidak hanya terhadap kredit tetapi ditambah dengan surat berharga yang diterbitkan (Obligasi) dan modal inti (Riyadi, 2015). Maka untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank adalah dengan melihat nilai rasio kredit terhadap simpanan dana pihak ketiga yang disebut dengan *Loan to Deposit Ratio*.

Menurut Kasmir (2016) menyatakan bahwa "*Loan to Deposit Ratio* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Loan to deposit ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%."

Menurut Harahap (2015) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* sebagai rasio yang menunjukkan seberapa besar pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang didanai oleh dana pihak ketiga. Sedangkan, menurut Darmawi (2012) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* adalah salah satu ukuran likuiditas dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman deposit. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara besarnya

seluruh kredit yang disalurkan oleh bank dengan jumlah penerimaan yang diterima oleh bank.

Ketentuan *Loan to Deposit Ratio* berdasarkan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP Tanggal 1 Oktober 2013 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum

Berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah yaitu sebagai berikut: 1). Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut: a) Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78%. b) Batas atas LDR Target ditetapkan: i) sebesar 100% sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; ii). sebesar 92% sejak tanggal 2 Desember 2013. iii) Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target dikenakan GWM LDR sebesar 0%. iv) Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah (saat ini sebesar 0,1), selisih antara batas bawah LDR Target dan LDR Bank, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah. v) Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini ditetapkan 14%) akan dikenakan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Atas (saat ini sebesar 0,2), selisih antara LDR Bank dan batas atas LDR Target, dan DPK dalam Rupiah. vi) Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target namun memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM Insentif (saat ini ditetapkan 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar

0%. 2) Perhitungan LDR Bank diperoleh dari pos-pos neraca mingguan yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

*Loan to Deposit Ratio* pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Maka begitu penting fungsi *Loan to Deposit Ratio* ini bagi perbankan yaitu sebagai berikut :1) Sebagai salah satu indikator penilaian kesehatan bank. 2) Sebagai salah satu indikator kriteria penilaian Bank Jangkar (*Loan to Deposit Ratio* minimum 50%). 3) Sebagai faktor penentu besar kecilnya Giro Wajib Minimum (GWM) sebuah bank. 4) Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang merger.

Begitu pentingnya arti angka *Loan to Deposit Ratio*, maka pemberlakuan pada seluruh bank sedapat mungkin diseragamkan, maksudnya adalah tidak ada pengecualian perhitungan *Loan to Deposit Ratio* diantara perbankan

Berdasarkan kebijakan mengenai *Loan to Deposit Ratio* ini diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional. Namun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional tanggal 26 Juni 2015, formula *Loan to Deposit Ratio* (LDR) diubah dengan

mengikut sertakan surat-surat berharga kedalam perhitungan *Loan to Deposit Ratio*, sehingga namanya diubah menjadi *Loan to Funding Ratio* (LFR).

Kebijakan penyesuaian ketentuan Giro Wajib Minimum *Loan to Deposit Ratio* itu diubah dengan memperluas komponen pendanaan agar mendorong penyaluran kredit ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih besar.

Menurut Kasmir (2016), batas aman dari *Loan to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 80 persen. Namun batas maksimal *Loan to Deposit Ratio* adalah 110 persen. Rasio *Loan to Deposit Rasio* dihitung dengan membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga dimana kredit yang digunakan merupakan total kredit yang di berikan kepada pihak ketiga, dan tidak termasuk kredit yang diberikan kepada pihak lain. Dari sisi lain beberapa praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman *Loan to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 85 persen. Namun batas toleransi sekitar antara 85-100 persen.

Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dalam PBI No.17/11/PBI/2015. Bank Indonesia menetapkan batas atas *Loan to Deposit Ratio* adalah sebesar 92 persen, sedangkan batas bawah *Loan to Deposit Ratio* adalah sebesar 78 persen.

## **2.7. Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam

menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya (2003) dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Prasetyoningrum, 2015). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha (Muhammad, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

Indikator dana pihak ketiga ini menurut Muhammad (2005) merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998, DPK terdiri dari: 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*) merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.2) Simpanan Tabungan (*Save Deposit*) Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.3) Deposito Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

## **2.8. Bank Indonesia 7 Day Repo Rate**

BI 7-Day Repo Rate (BI7DRR) merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral setiap bulannya yang diumumkan kepada publik melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) (Sumarto dan Rachbini, 2020). BI7DRR berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 Bank Indonesia, menggantikan BI Rate (Bank Indonesia, 2020). Penggunaan BI7DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pergantian BI rate menjadi BI7DRR supaya lembaga perbankan tidak perlu menunggu minimal 1 tahun untuk menarik uang yang tersimpan. Bank-bank bisa menarik uangnya setelah menyimpan selama minimal 7 hari di Bank Indonesia. Kemudian pengembalian tersebut ditambah dengan bunga yang besarnya seperti yang dijanjikan sebelumnya (Paramitha, dkk, 2021).

Tujuan akhir dari pengendalian BI rate/BI7DRR adalah untuk menentukan dan mengendalikan tingkat inflasi. Tingkat inflasi harus

terkendali oleh BI agar perekonomian dapat berjalan dengan stabil dan tanpa guncangan yang berarti (AW & Elida T, 2015).

Menurut AW & Elida T (2015) mekanisme BI didalam mengendalikan inflasi dengan menggunakan BI *rate*/BI7DRR dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) BI akan menaikkan BI *rate*/BI7DRR apabila diprediksi inflasi pada bulan-bulan ke depan akan melewati sasaran inflasi yang telah ditetapkan. 2) BI akan menurunkan BI *rate* apabila diprediksi inflasi pada bulan-bulan ke depan akan berada dibawah sasaran unflasi yang telah ditetapkan.

Mekanisme perubahan BI *rate*/BI7DRR sampai dapat memengaruhi inflasi disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme-mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur. Beberapa jalur diantaranya adalah jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga asset dan jalur ekspektasi

Menurut AW & Elida T (2015) perubahan BI *rate*/ BI7DRR akan memengaruhi hal- hal sebagai berikut: 1) Suku Bunga, perubahan BI *rate* akan memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila pertumbuhan ekonomi menurun (memburuk), BI dapat menurunkan BI *rate*/ BI7DRR. BI *rate*/ BI7DRR yang menurun akan menurunkan suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang menurun akan mendorong permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal ini akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin

bergairah.2) Nilai tukar, kenaikan BI *rate*/ BI7DRR akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia. Investor asing dapat membeli, misalnya Sertifikat BI (SBI) karena mereka mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada membeli SBI di negaranya. Aliran modal masuk asing ini akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi rupiah akan mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal. Kondisi ini akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya netekspor ini, selisih antara nilai ekspor dan impor, akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian di Indonesia.3) Harga asset, perubahan suku bunga BI *rate* dapat memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga asset. Kenaikan BI *rate* akan menurunkan harga asset seperti saham dan obligasi. Penurunan harga asset akan mengurangi kekayaan individu dan perusahaan. Pengurangan kekayaan individu dan perusahaan akan mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.4) Ekspektasi masyarakat, perubahan BI *rate* juga berdampak pada ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi. Hal ini disebut jalur ekspektasi. Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang terdorong akan menyebabkan tingkat inflasi meningkat. Tingkat inflasi yang meningkat akan mendorong

pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah atau gaji yang lebih tinggi. Kenaikan upah/gaji ini akan mendorong produsen untuk menaikkan harga-harga barang dan jasa.

## **2.9. Kurs (*Exchange Rate*)**

Menurut Blanchard (2006) kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Menurut Fabozzi dan Modigliani (1992) nilai tukar (kurs) didefinisikan sebagai jumlah satu mata uang yang bisa ditukarkan per unit mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam ketentuan mata uang lain. Menurut Fabozzi dan Modigliani (1992) Nilai tukar (kurs) didefinisikan sebagai jumlah satu mata uang yang bisa ditukarkan per unit mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam ketentuan mata uang lain. Sederhananya nilai tukar dapat disebut sebagai tingkatan kondisi nilai dari satu mata uang terhadap mata uang lainnya.

Awal mula penetapan nilai tukar dimulai dari ditetapkannya sistem Bretton Wood pada tahun 1944. Dimana pada saat itu terdapat pembagian dua kategori mata uang yaitu mata uang *hard currency* dan mata uang *soft currency*. Pada kategori mata uang *hard currency*, mata uang dari negara yang termasuk dalam kategori tersebut nilai mata uang dikaitkan serta dikonversi dengan berat emas. Sedangkan negara yang nilai mata uangnya termasuk dalam *soft currency* maka nilai mata uangnya dikaitkan pada mata uang kategori *hard currency* yang kemudian disebut sebagai *pegged exchange rate*. Hingga pada tahun 1971 *Bretton Wood System* berakhir

dengan ditandai munculnya Dekrit Presiden Nison yang menyatakan bahwa dollar USA tidak dinyatakan berdasarkan berat emas (Haryadi,2015).

Setelah sistem *Bretton Wood* pada nilai tukar berakhir, terdapat tiga sistem yang mengatur penetapan kurs atau nilai tukar uang, yaitu sistem kurs tetap (*fixed exchange rate system*), sistem kurs mengambang (*floating exchange rate system*), dan sistem kurs terikat (*Pegged Exchange Rate System*). Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate system*) adalah sistem yang nilai tukar dari mata uang asing ditentukan oleh bank sentral suatu negara dengan risiko bank sentral tersebut bersedia untuk membeli atau menjual mata uang asing dengan kuantitas berapapun. Kelemahan dalam sistem ini negara hanya memiliki peran pasif dalam menjaga stabilitas nilai tukar, namun dengan kelebihan bahwa bank sentral dapat mengendalikan nilai tukar (Haryadi,2015). Sistem kurs mengambang (*floating exchange rate system*) adalah sistem nilai tukar yang memungkinkan untuk bergerak bebas dalam artian ditentukan berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar terhadap valuta asing. Sistem kurs mengambang diklasifikasikan menjadi dua yaitu *free floating exchange rate system* dan *Managed (Dirty) Floating Exchange Rate*. Pada *free floating exchange rate system* tidak ada intervensi dari bank sentral. Sedangkan pada *Managed (Dirty) Floating Exchange Rate* terdapat intervensi dari bank sentral ketika pergerakan nilai tukar tidak terlihat menguntungkan bagi perekonomian negara tersebut (Ikatan Bankir Indonesia, 2012).

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab secara langsung pada permintaan dan penawaran valas dipengaruhi oleh permintaan akan impor barang atau jasa yang memerlukan dolar maupun valuta asing lainnya, serta ekspor modal dari dalam negeri ke luar negeri (Haryadi, 2015). Kemudian penawaran terhadap valas akan dipengaruhi oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar atau valuta asing lainnya, serta impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap nilai tukar rupiah yaitu posisi neraca pembayaran, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan nasional, kebijakan moneter, serta ekspektasi dan spekulasi (Arifin, 2007).

#### **2.10. Inflasi**

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara (Samuelson, 2001). Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2014). Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga,

pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2013). Menurut Rahardja dan Manurung (2004) suatu perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika tiga karakteristik berikut dipenuhi, yaitu : 1) terjadi kenaikan harga, 2) kenaikan harga bersifat umum, dan 3) berlangsung terus-menerus.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga-harga komoditas secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin melemahnya nilai uang suatu negara.

Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :a) Inflasi merayap (*creeping inflation*) biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil dan jangka waktu yang relatif lama. b) Inflasi menengah (*glopping inflation*) biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau triple digit). Kenaikan harga berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta bersifat akselerasi, harga minggu/ bulan ini lebih tinggi dari minggu/ bulan lalu. c) Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat sudah tidak lagi berkeinginan menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi (Noripin, 1998).

Adapun penyebab inflasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

(a) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*), inflasi ini biasanya

terjadi pada saat perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang dapat menimbulkan inflasi. (b) Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*), inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian sedang berkembang dengan pesat ketika jumlah pengangguran sangat rendah, sehingga menyebabkan meningkatnya biaya produksi yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang (Putong, 2013).

## **2.11. Keterkaitan Teoretis dengan Variabel Penelitian**

### **2.10.1 Hubungan *Non Performing Loan* Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Karuniawati (2017) bahwa *Non Performing Loan* (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* adalah keadaan suatu pinjaman pengkreditan yang pembayarannya tidak tepat waktu atau kurang lancar dalam pembayaran. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 menetapkan nilai maksimum NPL sebesar 5%. Semakin tinggi nilai NPL maka bank akan cenderung berhati-hati dalam memberikan kredit kepada

nasabah sehingga hal tersebut berdampak pada penyaluran kredit perbankan.

Sebagaimana yang ditunjukkan pada penelitian Rosalina, dkk (2019) dimana penelitiannya bertujuan menguji pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit pada PT.Bank Negara Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2007-2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara *Non Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit. Dengan demikian, pihak perbankan harus lebih memperhatikan kredit bermasalah (NPL) agar tidak dapat mengganggu kelancaran penyaluran kredit yang akan diberikan terhadap nasabah. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Akmalia (2016), Widiyanti, dkk (2022), Hermuningsih, dkk (2020), dan Nurlaili (2021) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putra & Rustariyuni, (2016) di mana hasil menunjukkan bahwa NPL mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014. Dan hasil Oktaviani (2012) yang mengemukakan bahwa NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Ini disebabkan apabila terjadi kenaikan nilai NPL atau kredit yang bermasalah masih dalam batas wajar menurut pihak bank dan masih mampu dikendalikan oleh bank, maka bank tetap akan meningkatkan penyaluran kreditnya.

Anita et al., (2016) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara rasio keuangan yang terdiri dari *return on asset* (ROA), *loan to deposit ratio* (LDR), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing loan* (NPL), dan *net interest margin* (NIM) baik secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *growth* (pertumbuhan ekonomi). Secara parsial pada model estimasi Bank BCA, variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *growth* adalah ROA dan NPL. Pada model estimasi Bank Mandiri variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *growth* adalah LDR, NPL dan NIM. Pada model estimasi Bank BNI variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *growth* adalah ROA, CAR, dan NPL. Pada model estimasi Bank BRI variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *growth* adalah ROA, LDR, NPL, dan NIM.

#### **2.10.2 Hubungan *Loan to Deposit Ratio* Terhadap Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi.**

Menurut Latumaerissa (2014), *Loan to deposit ratio* (LDR) adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan

pinjaman (loan request) nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman.

Semakin tinggi LDR maka kemampuan kredit yang telah disalurkan akan semakin tinggi dalam pembayaran kewajibannya. Nilai LDR yang tinggi akan meningkatkan kredit yang disalurkan oleh bank sebab LDR mengukur tingkat likuiditas suatu bank dengan jumlah kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya. Hal ini didukung oleh penelitian Yuwono (2012) yang hasilnya LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Krisdayanti et al. (2021) mengkaji bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Loan to Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit yang terjadi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2010-2019. Hasil diperoleh bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penyaluran Kredit dan *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. Untuk uji hipotesis secara simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga dan *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh secara simultan,

Ini juga didukung dengan beberapa penelitian diantaranya Amelia dan Murtiasih (2017) yang menemukan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit, sejalan dengan penelitian Wijayanti (2017) bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. LDR merupakan rasio untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga

yang disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi, LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang diterima oleh bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit

Keterkaitan LDR terhadap pertumbuhan ekonomi dibahas oleh Maharani dan Nirmala (2022) yang hasilnya menunjukkan bahwa *Loan deposit ratio* (LDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (PE) hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.548184 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0006 hal ini menunjukkan bahwa variabel *loan to deposit ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengaruh signifikan pada hasil regresi menunjukkan bahwa naik atau turun LDR akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (PE). Hal ini berarti bahwa jika *loan to deposit ratio* (LDR) meningkat sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia (PE) juga akan meningkat sebesar 0.548184 persen.

Hasil estimasi ECM jangka pendek variabel *loan to deposit ratio* (LDR) memiliki nilai koefisien sebesar 0.191980 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0270. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *loan to deposit ratio* (LDR) memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (PE). Artinya, setiap peningkatan *loan to deposit ratio* (LDR) sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,19 persen, *ceteris paribus*. Pengaruh positif dan

signifikan menunjukkan bahwa fluktuasi LDR dari Bank BUKU IV di Indonesia dari tahun 2015-2020 memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PE), sehingga dapat disimpulkan bahwa bank yang termasuk kedalam bank BUKU IV di Indonesia mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik karena memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya kerja nyata dari perbankan di Indonesia dalam menyalurkan perkreditan dalam menangani permodalan dan kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam pengajuan kredit dan simpanan sudah dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Karena pengaruhnya yang signifikan berarti meningkatnya LDR akan memberikan peningkatan juga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

### **2.10.3. Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi.**

Menurut teori yang dikemukakan oleh Melitz dan Pardue (1973) dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank, selanjutnya sumber dana ini dikelola bank dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pendapatan dari jasa pemberian kredit adalah bunga kredit merupakan pendapatan terbesar yang dimiliki bank, sehingga semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat dan keuntungan bank akan meningkat.

Menurut Kuswanto dan Taufiq (2014) dengan tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meliputi tabungan dan deposito terhadap kredit yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Data sampel sebanyak 45 bulan (Januari 2008 hingga September 2011). Dengan metode analisis regresi berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah DPK secara signifikan akan menaikkan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR di Indonesia.

Menurut Panggalih (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Suku Bunga KUR Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suku bunga KUR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,

Nasiha (2019) menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), total aset, Pembiayaan yang Diberikan (PyD) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Bank Umum Syariah (BUS). Sampel dalam penelitian ini

adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) yang melaporkan laporan keuangan tahunan periode 2013-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pembiayaan yang Diberikan (PyD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan total aset tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **2.10.4. Hubungan BI 7 DRR (BI Rate) Terhadap Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi.**

*BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* adalah komposisi penguatan kerangka operasi moneter yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru (Bank Indonesia, 2016). *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* bila dihubungkan dengan penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan. Suku Bunga BI Rate sangat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan penyaluran kredit, sehingga perubahan kebijakan moneter yang terjadi secara langsung dapat mempengaruhi tingkat penyaluran kredit.

Adapun keterkaitan BI 7 DRR dengan pertumbuhan ekonomi dikaji oleh Kurniati & Putri (2020), penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) parsial terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *BI Rate* pada pemberian kredit kepada bank umum, dan menganalisis pengaruh variabel *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Aset* (ROA) dan *BI Rate* secara bersamaan untuk penyaluran kredit ke bank umum. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder dari hasil publikasi Bank Indonesia dan situs resmi BEI di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum yang *go public* tercatat di BEI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 25 bank. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit sedangkan variabel *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran kredit. Secara simultan variabel *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *BI Rate* berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Menurut Andini dkk., (2016) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *BI rate*, dan BOPO terhadap penyaluran kredit perbankan, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari seluruh populasi yang dijadikan sampel, diperoleh 4 perbankan yang diteliti selama lima tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan dana pihak ketiga, *BI rate*, dan BOPO

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Secara parsial, dana pihak ketiga dan BI *rate* berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan, sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

Menurut Ambarwati dkk., (2018) dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI *Rate* dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2018. objek dalam penelitian ini adalah Jumlah Uang Beredar, BI *Rate*, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,804 dan nilai sig  $0,016 < 0,05$ . Hal ini berarti semakin tinggi jumlah uang beredar maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. BI *Rate* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,159 dan nilai sig  $0,022 < 0,05$ . Hal ini berarti semakin tinggi BI *Rate* maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar  $-0,063$  dan nilai sig  $0,039 < 0,05$ .

Basundari dkk., (2016) dimana meneliti bagaimana tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menghitung *Gross Domestic Product* (GDP). Penelitian ini menggunakan Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Nilai Tukar sebagai pendukung dari GDP, dengan menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM). Hasil analisis jangka

pendek menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam estimasi jangka panjang tingkat suku bunga dan nilai tukar mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan inflasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

#### **2.10.5. Hubungan Kurs Terhadap Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi**

Kurs diartikan sebagai harga mata uang satu negara terhadap negara lainnya. Kurs berpengaruh terhadap kegiatan bisnis perusahaan, utamanya pada perusahaan yang mengandalkan impor (Setiawan & Purwienanti, 2019). Besaran kurs berpengaruh pada investasi perusahaan dan harga barang yang diperdagangkan. Menurut Mankiw (2000) apresiasi nilai tukar satu negara terhadap mata uang negara lain membuat harga barang domestik cenderung lebih mahal dan barang di luar negeri menjadi relatif lebih murah. Sebaliknya, apabila nilai tukar satu negara terdepresiasi terhadap mata uang negara lain membuat harga barang domestik lebih murah dibanding barang luar negeri. Ketika nilai tukar rupiah terapresiasi (menguat), maka jumlah rupiah yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku atau barang lebih sedikit dan dapat dijual dengan nilai yang lebih mahal, hal tersebut tentu menguntungkan bagi para importir. Dalam kondisi rupiah terapresiasi, importir akan meningkatkan usahanya dengan melakukan kredit di bank, yang berimbas terhadap peningkatan permintaan

kredit perbankan. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi (melemah), maka importir membutuhkan jumlah rupiah lebih banyak untuk mengimpor barang atau bahan baku. Kondisi rupiah terdepresiasi dapat membuat kerugian bagi importir hingga kebangkrutan yang dapat menyebabkan usahanya berhenti, imbasnya terhadap penurunan permintaan kredit. Dengan kata lain, depresiasi nilai tukar dapat mengakibatkan turunnya penyaluran kredit perbankan, sedangkan nilai tukar yang terapresiasi dapat menyebabkan peningkatan penyaluran kredit perbankan (Azis & Thorbecke, 2002).

Menurut Mankiw (2000) apresiasi nilai tukar satu negara terhadap mata uang negara lain membuat harga barang domestik cenderung lebih mahal dan barang di luar negeri menjadi relatif lebih murah. Sebaliknya, apabila nilai tukar satu negara terdepresiasi terhadap mata uang negara lain membuat harga barang domestik lebih murah dibanding barang luar negeri. Ketika nilai tukar rupiah terapresiasi (menguat), maka jumlah rupiah yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku atau barang lebih sedikit dan dapat dijual dengan nilai yang lebih mahal, hal tersebut tentu menguntungkan bagi para importir. Dalam kondisi rupiah terapresiasi, importir akan meningkatkan usahanya dengan melakukan kredit di bank, yang berimbas terhadap peningkatan permintaan kredit perbankan. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi (melemah), maka importir membutuhkan jumlah rupiah lebih banyak untuk mengimpor barang atau bahan baku. Kondisi rupiah terdepresiasi dapat membuat kerugian

bagi importir hingga kebangkrutan yang dapat menyebabkan usahanya berhenti, imbasnya terhadap penurunan permintaan kredit. Dengan kata lain, depresiasi nilai tukar dapat mengakibatkan turunnya penyaluran kredit perbankan, sedangkan nilai tukar yang terapresiasi dapat menyebabkan peningkatan penyaluran kredit perbankan (Azis & Thorbecke, 2002).

Penguatan nilai tukar (apresiasi) memiliki efek positif terhadap perekonomian karena ketika nilai rupiah menguat, harga barang dari luar negeri menjadi lebih murah. Hal ini mengakibatkan peningkatan produktivitas produksi barang dan jasa yang menggunakan bahan impor, karena biaya input yang lebih rendah dan produktivitas yang meningkat. Dengan demikian, pendapatan secara keseluruhan meningkat, daya beli masyarakat juga naik, roda perekonomian berjalan lancar, dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Bahar, 2022)

Hubungan antara kurs dan pertumbuhan ekonomi dipaparkan oleh Septiani, dkk (2018). Dimana tujuan penelitiannya untuk menganalisis variabel Investasi dan Inflasi serta Kurs terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Data yang digunakan adalah *data time series* dari tahun 2006-2015. Hasil dari penelitian adalah: (1) Variable Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015. (2) Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015. (3) Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama

kurun waktu 2006-2015. Hasil serupa juga diungkap Susanto (2018) bahwa secara parsial maupun secara simultan variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,926 yang berarti menunjukkan adanya korelasi/hubungan yang sangat kuat antara inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ini juga diungkapkan Sianipar (2019) yang menganalisis pengaruh inflasi, investasi, nilai tukar, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitiannya menggunakan data sekunder dengan kurun waktu tiga puluh tahun (1981-2017), dimana data tersebut diperoleh data Badan Pusat Statistika, WorldBank, dan OECD. Model analisis ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan variabel bebas, yaitu inflasi ( $X_1$ ), Nilai Tukar ( $X_3$ ), dan Tenaga kerja ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan dan bertanda negatif terhadap variabel terikatnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ). Sedangkan variabel Investasi ( $X_2$ ) hasil berpengaruh signifikan dan bertanda positif terhadap variabel terikatnya Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ).

Berbeda dengan hasil penelitian Pradana (2019) dimana penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran kredit modal kerja bank umum untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil estimasi dengan

analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial suku bunga kredit modal kerja secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit modal kerja bank umum untuk UMKM di Kota Tangerang. Sebaliknya, dana pihak ketiga dan kurs secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit modal kerja bank umum untuk UMKM di Kota Tangerang. Pengaruh positif kurs terhadap penyaluran kredit modal kerja bank umum untuk UMKM disebabkan oleh permintaan bahan baku impor oleh pelaku UMKM. Para importir menjadi peluang bagi bank untuk menyalurkan kredit karena para importir akan membutuhkan dana lebih banyak dalam menunjang usahanya khususnya ketika rupiah mengalami depresiasi. Kebutuhan akan dana yang lebih banyak akan mengakibatkan permintaan terhadap kredit bank khususnya kredit modal kerja meningkat sehingga penyaluran kredit modal kerja untuk UMKM juga meningkat.

Dan juga Ismanto,dkk (2019) kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uji T yang dilakukan maka terdapat pengaruh secara parsial antara kurs terhadap pertumbuhan ekonomi, kurs memiliki nilai koefisien regresi sebesar 363.789 bernilai positif sehingga kurs berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Semakin tinggi nilai kurs maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

### **2.10.5. Hubungan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi.**

Susanti dkk. (2007) mengungkapkan inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Inflasi menurut Pohan (2008) adalah suatu keadaan dimana harga meningkat secara terus menerus yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Menurut Manurung dan Rahardja (2004) suatu perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika terjadi kenaikan harga yang bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Meningkatnya inflasi akan menyebabkan masyarakat akan menarik dana yang disimpan di bank. Hal ini akan menyebabkan pendapatan bank menurun dan kredit yang disalurkan juga menurun, selain itu, peningkatan suku bunga pinjaman yang diakibatkan inflasi juga akan menghambat bank dalam menyalurkan kreditnya. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sharma dan Gounder (2012) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, hasil serupa juga ditemukan oleh Aryaningsih (2008), Nazir dkk. (2013) dan Rachmansyah (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, Artinya jika Inflasi semakin meningkat maka pertumbuhan kredit akan menurun. Inflasi memiliki dampak yang erat terhadap pertumbuhan kredit disuatu negara maupun daerah, hal ini dapat dijelaskan secara sederhana terutama dengan teori kuantitas uang yang diutarakan oleh Keynes, di mana dalam teori tersebut dinyatakan bahwa

kenaikan inflasi dapat langsung berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga, sehingga mengurangi minat masyarakat terhadap kredit.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Menurut Salim, dkk (2021) inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Apabila tingkat inflasi semakin tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Barro (1995) membuat penilaian atas dampak inflasi terhadap kinerja ekonomi dengan menggunakan data untuk sekitar 100 negara selama periode 1960-1990. Studinya mencapai kesimpulan bahwa jika sejumlah karakteristik negara tetap konstan, maka hasil regresi menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata inflasi dari 10 persen per tahun mengurangi tingkat pertumbuhan PDB riil dengan 0,2 hingga 0,3 persen per tahun dan menurunkan rasio investasi terhadap PDB sebesar 0,4 menjadi 0,6 persen.

Sejalan dengan hasil Simanungkalit (2020) yang menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1983-2014. Dan juga penelitian Agus dan Herawati (2022) inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

### **2.10.7. Hubungan Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi**

Hubungan antara penyaluran kredit terhadap pertumbuhan ekonomi dikaji oleh Lestari dkk.(2021) hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif Kredit modal kerja, Kredit investasi, Kredit konsumsi terhadap Pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi se Sumatera yang artinya jika kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi meningkat maka pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi Sumatera juga akan meningkat.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh Fahriyansah (2018) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit yang disalurkan oleh bank umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2010-2016. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredit sedangkan inflasi, investasi, infrastruktur dan tenaga kerja sebagai variabel kontrol. Dengan menggunakan metode Panel Data Statis diperoleh hasil estimasi yang menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi mempunyai hubungan negatif yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan kredit dan output yang dihasilkan. Variabel lain yang berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif adalah inflasi dan investasi, sedangkan infrastruktur dan tenaga kerja tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Kennedy dan Ittoya (2014) yang mana penelitiannya mengkaji tentang kontribusi pinjaman bank komersial untuk usaha kecil

pada pertumbuhan ekonomi Nigeria. Penelitian ini menggunakan produk domestik bruto sebagai proksi untuk ekonomi yang merupakan variabel dependen dan pinjaman bank komersial untuk perusahaan skala kecil sebagai variabel independen untuk periode studi (1993-2012). Pendekatan model ko-integrasi dan koreksi kesalahan digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel. Semua variabel yang digunakan stasioner pada perbedaan pertama dan hasilnya menunjukkan hubungan jangka panjang yang ada di antara variabel. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pinjaman bank komersial untuk perusahaan skala kecil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria dalam periode penelitian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa usaha skala kecil tidak memiliki akses kredit yang merupakan masalah utama bagi perusahaan skala kecil di Nigeria karena lembaga keuangan tradisional belum mampu memenuhi kebutuhan kredit mereka. Pemerintah harus mendorong usaha kecil melalui skema kredit mikro mereka, untuk memberikan pinjaman lunak dan memperkenalkan kembali skema kredit usaha kecil sehingga penerima manfaat dapat menggunakannya untuk menjalankan usaha kecil.

### **2.11. Studi Empiris Terkait Penelitian**

Adapun studi empiris terkait penelitian dikemukakan pada table berikut:

**Tabel 2.1**  
Peta Studi Empiris Sebelumnya

Peneliti	Tahun	Lokasi Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
Peter J. Morgan dan Victor Pontines	2018	Singapura	<i>Financial Stability And Financial Inclusion: The Case Of SME Lending</i>	NPL dapat meningkatkan probabilitas gagal bayar bank dan dapat mengakibatkan kebangkrutan yang menyebabkan menurunnya pemberian kredit kepada pelaku ekonomi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
Widiyanti, dkk	2022	Indonesia	<i>The Influence Of Financial Performance On Credit Distribution In Indonesia Stock Exchange-Listed Commercial Banks</i>	Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum, LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum, <i>Non Performing Loan</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum.
Badiea Shoukat dkk	2019	38 Negara	<i>Real interest rate and economic growth: A statistical exploration for transitory economies</i>	Penelitian ini mengkaji mekanisme yang menyebabkan tingkat suku bunga riil memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara transitori. Penelitian ini menggunakan data panel dinamis berdasarkan <i>Generalized Method of Moments</i> berdasarkan sepuluh persamaan SEM untuk periode 1996–2015 di 38 negara yang memiliki tingkat transisi berbeda. Hasilnya menunjukkan hubungan terbalik berganda antara tingkat bunga riil dengan pertumbuhan ekonomi melalui investasi lokal dan asing, sumber daya manusia, keterbukaan perdagangan, nilai tukar, inflasi, kekuatan kelembagaan, ketidakstabilan politik, dan korupsi. Studi ini menemukan bahwa tingkat suku bunga ditentukan secara eksogen di negara-negara transitori dimana tingkat suku bunga riil melalui berbagai jalur tidak hanya merugikan tetapi juga membatasi perekonomian untuk mempertahankan tingkat transisinya dan mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Sebagai implikasi kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga rendah sangat diperlukan dan bermanfaat bagi negara-negara transit/berkembang untuk mempertahankan transisi dan mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan cepat.
Kin Sibanda	2012	Afrika Selatan	<i>The Impact Of Real Exchange Rates On Economic Growth: A Case Study Of South Africa.</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar riil, pembentukan modal tetap bruto dan suku bunga riil mempunyai dampak jangka panjang yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar dan perdagangan internasional mempunyai dampak jangka panjang yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan. Dari Berdasarkan hasil regresi, tercatat bahwa <i>undervaluation</i> terhadap mata uang secara signifikan menghambat pertumbuhan dalam jangka panjang, namun secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dengan demikian, kebijakan

				depresiasi nilai tukar untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi hanya efektif di negara-negara tersebut dalam jangka pendek dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan bahwa ketidakselarasan ( <i>overvaluation</i> dan <i>undervaluation</i> ) mata uang seharusnya dihindari dengan cara apa pun. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan karena suku bunga berpengaruh terhadap nilai tukar, hal ini memang berdampak signifikan sehingga merekomendasikan agar kebijakan moneter saat ini di Afrika Selatan harus dipertahankan.
Sergey Drobyshevsky dkk	2017	Rusia	<i>The Effect Of Interest Rates On Economic Growth</i>	Hasil menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga riil (ex-post) tidak berpengaruh signifikan terhadap dinamika keluaran dan komponen-komponennya. Oleh karena itu, upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang longgar justru akan meningkatkan inflasi dibandingkan memberikan dampak yang diharapkan pada pertumbuhan sektor ril. Tinjauan terhadap praktik-praktik internasional menunjukkan bahwa baik secara nominal maupun, pada tingkat yang lebih besar, suku bunga riil di Rusia relatif rendah sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Clement Moyo dan Le Roux	2018	Afrika Selatan	<i>Interest Rate Reforms And Economic Growth: The Savings And Investment Channel</i>	Penelitian ini mengkaji dampak reformasi suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan investasi di Negara-negara SADC periode 1990-2015. Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik estimasi <i>Pooled Mean Group</i> (PMG) Selain itu, uji batas ARDL dilakukan untuk masing-masing negara guna menguji kointegrasi. Hasil menunjukkan bahwa suku bunga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan investasi.
Tinoco-Zermeño, dkk	2022	Mexico	<i>Inflation and Bank Credit</i>	Hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat inflasi mempunyai dampak negatif terhadap kredit dalam jangka panjang, namun dampak tersebut cenderung positif dalam jangka pendek.
Aris Munandar dkk	2019	Indonesia	<i>The Influence of Inflation and Interest Rates on Working Capital Credit of Micro Small and Medium Enterprises</i>	Penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga mempunyai pengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengaruh inflasi dan suku bunga tidak terlalu signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Inflasi berpengaruh positif dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit modal kerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Supiah Ningsih dan Danil Syahputra	2020	Indonesia	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Perbankan Konvensional Dan Dana Pihak Ketiga perbankan Syariah terhadap pertumbuhan	Hasil dari penelitian ini adalah variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional berpengaruh signifikan terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB). Selanjutnya variabel dana pihak ketiga

			Ekonomi Indonesia	perbankan konvensional dan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah secara simultan signifikan mempengaruhi variabel Produk Domestik Bruto (PDB).
Sari Ni Ketut Ping Purnama, Baskara I Gde Kajeng	2023	Indonesia	<i>The Effect Of Banking Performance On Indonesia's Economic Growth: The Camel Approach</i>	Hasil dari studi menunjukkan bahwa kinerja perbankan yang diwakili oleh pendekatan CAMEL berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan CAMEL dalam penelitian ini terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Net Interest Margin</i> (NIM), <i>Return on Asset</i> (ROA), dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) yang masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda. CAR, NIM, dan ROA ditampilkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, NPL dan LDR menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kairat Umargaliyev	2017	Korea Selatan	<i>Impact of real exchange rate on economic growth: Evidence from Post-Soviet States</i>	Penelitian ini mengkaji hubungan antara nilai tukar dan kinerja ekonomi untuk 15 negara bagian Pasca Soviet dari tahun 1991 hingga 2015. Menggunakan metode fixed effect dengan data panel, makalah ini memberikan bukti empiris bahwa apresiasi nilai tukar memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi.
Fasanya dkk	2013	Nigeria	<i>Does Monetary Policy Influence Economic Growth In Nigeria?</i>	Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Penelitian ini menunjukkan hal itu tingkat inflasi, nilai tukar, dan cadangan devisa merupakan instrumen kebijakan moneter yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan di Nigeria.
Hafas Furqania and Ratna Mulyany	2009	Malaysia	<i>Islamic Banking and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia</i>	Hasil menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pembiayaan bank syariah berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal Malaysia. Dalam hal ini, perbankan syariah telah secara efektif memainkan peran utamanya sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi transmisi tabungan dari rumah tangga surplus ke rumah tangga defisit.
Maharani dan Tiara	2022	Indonesia	Pengaruh Ukuran Bank, Fungsi Intermediasi Bank Dan Variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2015-2020	Hasil menunjukkan bahwa variabel total aset bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. <i>Loan to deposit ratio</i> (LDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Suku bunga acuan Bank Indonesia dan inflasi. Variabel suku bunga acuan Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan jangkal pendek.
Caporale dkk	2014	European	<i>Financial Development And Economic Growth: Evidence From 10 New European Union Members</i>	Hasil menunjukkan bahwa pasar saham dan kredit masih kecil kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sektor perbankan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi

Stefano Usai, Marco Vannini	2005	Italy	<i>Banking Structure And Regional Economic Growth: Lessons From Italy</i>	Hasil menunjukkan bahwa ukuran keseluruhan sektor keuangan memiliki dampak yang lemah pada pertumbuhan, tetapi beberapa perantara lebih baik daripada yang lain: bank koperasi dan lembaga kredit khusus memainkan peran positif, sementara bank swasta dan negeri tidak mempengaruhi pertumbuhan atau memiliki pengaruh negatif
Aprian Doni Faizal, Syapsan dan Any Widayatsari	2020	Indonesia	Pengaruh Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau	Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan dan jumlah penduduk yang bekerja mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.